



Analisis Keputusan Pemerintah Kanada dalam Mengadopsi United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) Pada Tahun 2016

Luthfiyya Tsana Somadianti, Shary Charlotte Henriette Pattipeilohy
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In 2016, Canada announced that they will implement the United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) during the United Nations General Assembly. It is widely known that Canada is home to indigenous communities that consisted of inuit, metis and first nations people. The Canadian government also regulate the lives of canada's indigenous communities through the Indian Act. The announcement made by Canada raised questions such as why suddenly Canada made the decision and announce such decision in front of international stage. Using decision making theory by Snyder, Bruck and Sapin alongside the concept of human rights and identity, the researcher aims to understand what factors that influenced canada to make such decision. This study resulted in the founding of influencing factors divided into internal and external factors. Dominant party, Canada's identity as a multicultural country, and a protest by idle no more movement were the factors that categorized as the internal factors. Meanwhile, pressures from international organizations, the changed stances of the countries that originally share the same views as Canada, pressures from other countries regarding Canada's stance on UNDRIP, and also the global trend on human rights enforcement were the external factors.

Keyword: *Canada, Indigenous People, UNDRIP, Human Rights, Identity, Decision Making Theory*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Kanada terbagi menjadi tiga kelompok utama, yakni Inuit, metis dan juga first nations. Mereka adalah orang – orang yang telah terlebih dahulu mendiami wilayah Kanada sebelum kedatangan bangsa Eropa. Menurut dugaan antropolog, nenek moyang dari masyarakat adat ini memasuki wilayah daratan benua Amerika melalui Selat Beringia yang menghubungkan wilayah Asia hingga ke Alaska pada Zaman Es sekitar 12.000 - 30.000 tahun yang lalu (Green, 2010). Kehidupan masyarakat adat di Kanada tidak dapat dikatakan berjalan secara harmonis dengan

pemerintah Kanada serta warga Kanada non-masyarakat adat. Pemerintah Kanada mengatur mengenai masyarakat adatnya dalam sebuah undang – undang yang dinamakan *Indian Act*, yang mulanya bertujuan untuk membuat masyarakat adat berasimilasi dengan masyarakat pendatang dari Eropa (Parrot, 2018). Selain itu, sejarah kelam seperti *residential school* juga pernah terjadi. Ditambah lagi permasalahan – permasalahan seperti adanya kesenjangan sosial antara masyarakat adat dan non-masyarakat adat. Krisis air bersih serta krisis tempat tinggal juga menimpa banyak kelompok masyarakat adat dan wilayahnya. Kasus lainnya yang menimpa masyarakat adat di Kanada yakni *Missing And Murdered Indigenous Women And Girls* (MMIWG) yang telah terjadi selama beberapa dekade. Meski angka dari korban tidak dapat dihitung pasti, namun menurut laporan milik *Royal Canadian Mounted Police* (RCMP) dari rentang tahun 1980 hingga tahun 2012, jumlah korban mencapai 1,017 wanita (Hansen, 2017).

Mebutuhkan hingga hampir tiga dekade bagi proses perumusan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) sebelum akhirnya secara resmi dideklarasikan pada tahun 2007. Kanada adalah salah satu dari empat negara yang menolak untuk menyetujui deklarasi tersebut. Tiga negara lainnya adalah Amerika Serikat, Selandia Baru dan juga Australia. Sikap tersebut bertahan hingga satu persatu keempat negara yang mulanya tidak menyetujui, merubah sikap mereka. Kanada sendiri tidak melakukan tindakan yang cukup signifikan terkait dengan sikapnya terhadap UNDRIP setelah merubahnya pada tahun 2010.

Dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau, Kanada baru mendeklarasikan di hadapan audiens internasional yang menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tahun 2016 lalu. Tindakan yang dilakukan dalam tingkat nasional oleh Perdana Menteri Justin Trudeau yang baru memasuki awal masa pemerintahannya juga terbilang kontras dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kanada sebelumnya. Khususnya bagi kasus *Missing and Murdered Indigenous Women and Girls* (MMIWG) yang kemudian dibentuk *national inquiry* atau investigasi tingkat nasional untuk mengusut permasalahan tersebut. Sikap dari Pemerintah Kanada tersebut berbanding terbalik dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang kurang memperhatikan permasalahan – permasalahan terkait dengan masyarakat adat. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa saja faktor – faktor yang menjadi pendorong bagi Pemerintah Kanada dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi UNDRIP pada tahun 2016 lalu.

Menggunakan *Decision Making Theory*, faktor – faktor yang mempengaruhi sendiri terbagi kedalam dua kategori yakni faktor internal dan eksternal. Jika faktor eksternal adalah faktor – faktor yang datang dari luar lingkup negara, maka faktor internal adalah faktor – faktor pendorong yang datangnya dari dalam lingkup negara. Termasuk dalam faktor – faktor internal diantaranya adalah partai yang dominan di pemerintahan, kemudian tekanan dari Gerakan aktivisme masif masyarakat adat ‘Idle No More’, serta identitas Kanada yang secara internasional dikenal sebagai negara multikultural. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal yakni adanya tekanan dari organisasi – organisasi internasional serta negara – negara lain, lalu disusul dengan berubahnya sikap negara – negara lain yang semula memiliki sikap yang sama dengan Kanada dan meningkatnya tren global mengenai pembelaan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Selama bertahun – tahun, sejarah mencatat bagaimana kehidupan masyarakat adat di Kanada berlangsung. Dimasa lalu, masyarakat adat tidak luput dari tindakan Pemerintah Kanada yang menginginkan masyarakat adat untuk berasimilasi dengan masyarakat pendatang dari Eropa yang lambat laun menjadi mayoritas. Mulai dari pelarangan penyelenggaraan tradisi mereka seperti potlatch dan powwow, hingga mewajibkan mereka untuk mengirimkan anak – anaknya ke *Residential School*. Hal – hal yang disebutkan tadi merupakan salah satu isi dari undang – undang Kanada yaang disebut dengan *Indian Act* sebelum kemudian mengalami amandemen. Pada masa modern, masyarakat adat Kanada juga masih tidak luput dari ketidakberuntungan. Krisis tempat tinggal yang diikuti dengan permasalahan kesehatan di ‘ekornya’, tidak lupa dengan krisis air bersih yang telah berlangsung selama beberapa dekade adalah beberapa dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Kanada.

Hubungan Pemerintah Kanada dengan masyarakat adat Kanada juga tidak dapat dibidang harmonis. Diketahui telah berkali – kali pemerintah Kanada tidak memperhatikan situs – situs yang dianggap suci oleh masyarakat adat saat melakukan pembangunan ataupun memberikan izin kepada perusahaan – perusahaan yang melakukan pembangunan. Memang, pada tahun 2010 lalu, Kanada mencabut posisinya sebagai salah satu dari empat negara yang tidak nmenyetujui UNDRIP. Namun, berbeda dengan sikap yang ditunjukkan pemerintah Kanada pada tahun 2016 yang lalu yang mengumumkan komitmennya atas UNDRIP dalam kesempatan Sidang Umum PBB. Kanada pada waktu itu hanya mengumumkannya pada tingkat domestik dan juga mengunggah pernyataannya ke situs resmi milik pemerintah Kanada pada tahun 2010 lalu. Tidak ada tindakan yang terbilang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Kanada setelahnya. Bahkan setelah Perdana Menteri yang pada waktu itu menjabat— Stephen Harper, menerima pertanyaan terkait dengan perlu tidaknya investigasi tingkat nasional (*National Inquiry*) untuk kasus *missing and murdered indigenous women and girls* saat ia melakukan sesi wawancara. Ia menjawab bahwa tindakan seperti itu tidak terlintas dalam radar Kanada (Kappo, 2014).

Keputusan, seperti apapun bentuknya sudah pasti memiliki banyak faktor yang berpengaruh didalamnya. Pemerintah Kanada yang mendeklarasikan bahwa mereka akan berkomitmen dengan UNDRIP pada kesempatan Sidang Umum PBB pada tahun 2016 lalu juga termasuk kepada apa yang disebut dengan keputusan. Dengan mempertimbangkan rekam jejak hubungan pemerintah Kanada dengan masyarakat adatnya, fenomena ini merupakan sesuatu yang perlu untuk dianalisis apa yang menjadi pendorong bagi Kanada untuk mengambil keputusan tersebut. Pengambilan keputusan atau *decision making*, menurut Snyder, Bruck dan Sapin (1962) adalah sebuah tindakan yang terencana (*planful action*). Snyder dan kedua rekannya menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menjadi pengaruh. Salah satu faktor tersebut disebut olehnya sebagai *setting*, yang kemudian dibedakan lagi menjadi dua, yakni setting internal dan juga *setting* eksternal. Snyder mendefinisikan setting sebagai faktor – faktor yang dapat dianggap relevan dalam proses pengambilan keputusan. Baik internal maupun eksternal, kedua *setting* ini memiliki kedudukan yang sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain (Snyder, Bruck & Sapin, 1962). Pengelompokan *setting* ini berangkat dari anggapan Snyder bahwa dalam dunia politik internasional, yang mempengaruhi tindakan sebuah aktor tidak hanya terbatas pada aktor negara saja. Faktor non-pemerintah lainnya seperti opini publik, unsur geografi, serta keadaan

politik domestik juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses pengambilan sebuah keputusan.

Partai Dominan Pemimpin

Apa yang menjadi perhatian dari sebuah partai politik yang mendominasi pemerintahan, biasanya selalu mempengaruhi arah dari kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah dikemudian hari. Partai politik sendiri merupakan salah satu dari beberapa hal yang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan (Xing, 2015). Dapat dikatakan demikian karena partai politik memiliki prinsip atau program yang mereka junjung. Prinsip atau program yang mereka junjung tersebut kemudian dapat membentuk arah dan sifat sebuah kebijakan yang kemudian diambil oleh sebuah negara. Pada saat Kanada mendeklarasikan dukungannya terhadap UNDRIP pada tahun 2016 lalu, Kanada baru saja melangsungkan pemilihan umum pada tahun sebelumnya. Perdana Menteri yang terpilih adalah Justin Trudeau yang berasal dari Partai Liberal dan juga merupakan pemimpin dari partai tersebut. Partai Liberal Kanada juga memenangkan mayoritas kursi di Parlemen Kanada.

Partai Liberal Kanada, seperti partai – partai politik lainnya tentu memiliki sebuah pandangan dan nilai – nilai yang dijadikan prinsip. Meskipun slogan, visi dan misi tidaklah selalu sama, Partai liberal Kanada masih tetap memiliki pandangan yang sama. Partai Liberal Kanada memiliki pandangan yang kuat mengenai Hak Asasi Manusia. Prinsip mengenai hak asasi manusia yang dipegang oleh Partai Liberal Kanada diperkuat oleh pernyataan – pernyataan yang dibuat oleh tokoh – tokoh dari partai liberal Kanada. Seperti pernyataan John M Turner yang menyatakan bahwa liberal percaya bahwa hak – hak dasar dan kebebasan setiap individu adalah penting bagi sebuah negara. Ia juga menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk diberikan kesempatan yang sama untuk membangun hidupnya dan mengasah potensinya (Liberal Party of Canada, 2005). Pernyataan yang kuat mengenai posisi partai liberal Kanada terkait dengan Hak asasi manusia dapat dilihat dari pidato yang dinyatakan bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Perwakilan dari Partai Liberal Kanada menyatakan secara jelas dan menegaskan bahwa baik secara domestik maupun internasional, Partai Liberal Kanada memiliki komitmen yang kuat dalam menegakan hak asasi manusia (Liberal Party of Canada, 2014).

Posisi dari Partai Liberal Kanada terkait dengan hak – hak masyarakat adat diperkuat dengan bagaimana Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada terpilih tahun 2016 yang berasal dari Partai Liberal, selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan organisasi – organisasi masyarakat adat. Pemimpin dari Partai Liberal Kanada, Justin Trudeau, yang sekarang ini memimpin sebagai Perdana Menteri Kanada juga menyampaikan pandangan dan rencananya mengenai hubungan antara pemerintah federal Kanada dan juga dengan masyarakat adat Kanada. Dalam sebuah kesempatan, tepatnya bertepatan pada saat Pertemuan Tahunan Majelis First Nations (Annual General Assembly) yang ke-36, Justin Trudeau menyampaikan sebuah pidato yang memiliki makna bahwa pemerintah Kanada dibawah kepemimpinan partai liberal akan mengakui pemerintahan masyarakat adat sebagai rekan sepenuhnya dalam pemerintah federasi, dan akan bekerja dengan masyarakat adat untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan kesempatan di Kanada. Selain itu, Partai Liberal Kanada juga ikut mendukung agar diloloskannya sebuah undang – undang agar hukum di Kanada selaras dengan UNDRIP pada tahun 2017 lalu. Rancangan Undang – Undang tersebut dikenal dengan Bill C-262. Pencetusnya adalah Romeo Saganash, seorang anggota parlemen

dari partai New Democratic Party (NDP) Kanada yang juga berasal dari suku masyarakat adat Cree di Kanada.

Protes Dari Gerakan Idle No More

Gerakan protes Idle No More dimulai pada akhir tahun 2012. Gerakan tersebut adalah gerakan protes masyarakat adat terbesar dalam sejarah Kanada. Hal yang membuat Idle No More menjadi salah satu gerakan protes masyarakat adat terbesar dalam sejarah Kanada ialah karena hampir semua kelompok masyarakat adat memberikan dukungannya terhadap gerakan ini. Gerakan yang berlangsung selama bertahun – tahun ini berhasil membuat isu – isu yang dihadapi oleh masyarakat adat menjadi diperhatikan oleh hampir seluruh partai politik di Kanada. Isu yang menjadi konsentrasi gerakan idle no more tidak hanya seputar masalah eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah Kanada di wilayah milik masyarakat adat. Salah satu hal yang diprotes oleh masyarakat adat dalam gerakan aktivisme Idle No More ini adalah Bill C-45: Job and Growth Act atau Omnibus Law yang hendak disahkan oleh pemerintah Kanada pada saat itu.

Gerakan protes Idle No More yang terjadi di Kanada juga dibarengi dengan sebuah gerakan yang terjadi di dunia maya. Tepatnya yakni media jejaring sosial Twitter. Akibatnya, gerakan ini menjadi masif dan cukup mendapatkan perhatian. Menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2015 berkaitan dengan aktivisme dunia maya Idle No More di jejaring sosial Twitter ini, ada sebanyak 743,365 ‘cuitan’ terhitung dari periode waktu November 2012 hingga periode Januari 2013 (Callison & Hermida 2015). Ada sebanyak 500 aktor dengan 500 cuitan yang dianggap berpengaruh dalam gerakan aktivisme tersebut. Fitur tagar yang disediakan oleh Twitter juga mempermudah publik untuk dengan mudah mengikuti pembaruan real-time dari topik Idle No More ini. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa memang kekuatan dari media jejaring sosial tidak bisa dianggap sepele. Selain itu, media jejaring sosial juga berpotensi untuk meraih audiens yang lebih luas. Bahkan dari negara – negara lain karena sifat internet yang seperti tidak memiliki batas. Tanya Kappo dan Jessica Gordon sebagai organisator dari gerakan ini tidak menyangka bahwa gerakan mereka ini bisa menjadi sangat besar.

Identitas Kanada Sebagai Negara Multikultural

Kanada terkenal sebagai negara yang ramah terhadap warganya apapun latar belakang ras mereka. Pada tiap kesempatan, Kanada membanggakan identitas mereka sebagai negara multikultural. Para negarawan di Kanada menyebutnya sebagai ‘Canadian Identity’. Identitas dari Kanada sebagai negara multikultural juga terkenal hingga kepada tingkat Internasional. Identitas sebagai negara multikultural pun juga dipakai oleh Kanada untuk mempromosikan kepentingannya baik dalam hal bisnis maupun politik di ranah global (Srikanth, 2012). Karena identitas multikultural Kanada yang berasal dari kebijakan, banyak negara yang kemudian terinspirasi untuk menetapkan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan topik multikulturalisme. Beberapa negara yang terinspirasi diantaranya adalah Australia dan Amerika Serikat, Inggris dan juga negara – negara maju lainnya.

Akar dari identitas multikulturalisme di Kanada sendiri berawal dari konflik di Kanada yang muncul pada akhir dekade 1960-an yang melibatkan wilayah Quebec. Pada saat itu, Quebec yang mayoritas penduduknya berbahasa Perancis, tidak merasa menjadi bagian dari Kanada karena Kanada pada saat itu masih hanya mengakui bahasa

Inggris sebagai bahasa resmi negaranya. Karenanya, Quebec menginginkan untuk berpisah dari Kanada. Pemerintah Kanada yang panik, memikirkan solusi untuk membuat Kanada sebagai negara bilingual pada tahun 1969 (Cultural Survival, 1994). Undang – undang tersebut kemudian menjadikan Kanada sebagai negara bilingual, yakni berbahasa Inggris dan Perancis.

Jika dipandang dari segi sejarah, Kanada memang negara yang multikultural. Kanada sendiri adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah pendatang dan memiliki sejarah panjang kolonisasi. Menurut data sensus tahun 2016 yang dilaporkan, masyarakat Kanada kebanyakan memiliki darah keturunan Inggris, Irlandia, Skotlandia, Jerman, Tiongkok, Italia, First Nations atau Masyarakat Adat, India, Ukraina, Belanda dan Polandia. Bahkan dalam sensus juga disebutkan bahwa sebesar 21,9% warga negara Kanada lahir diluar Kanada (Canada Parliament n.d). Secara global pun banyak yang mengakui bahwa Kanada adalah simbol multikulturalisme karena melihat dalam kebijakan multikulturalismenya, Kanada merangkul masyarakat Kanada dari berbagai latar belakang budaya. Kebijakan yang kemudian menjadi identitas Kanada tersebut juga menjamin akan pemerataan distribusi kekuasaan dan hak (Marger, 2015 dalam Guo & Wong, 2015).

Opini publik dari warga Kanada non-masyarakat adat mengenai isu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat juga setiap tahun mulai berubah. Sebuah survey yang diadakan oleh kantor berita Globe and Mail pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perhatian masyarakat Kanada mengenai permasalahan masyarakat adat telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2009. Presentase yang pada mulanya hanya duduk pada angka 12% saja, meningkat menjadi 22%. Sebanyak 87% masyarakat Kanada setuju bahwa edukasi mengenai sejarah kolonial Kanada terhadap masyarakat adat Kanada harus diajarkan kepada anak – anak sekolah.

Tekanan Dari Organisasi – Organisasi Internasional

Organisasi Internasional banyak yang menyorot apa yang terjadi di Kanada. Salah satu diantaranya adalah Amnesty International yang menuliskan sebuah laporan kepada badan PBB Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) mengenai kondisi dari masyarakat adat di Kanada dan juga sikap pemerintah Kanada terhadap masyarakat adat. Dalam publikasi tersebut, disebutkan bahwa salah satu permasalahan cukup parah yang dihadapi oleh Kanada sebagai negara multikultural adalah rasisme, termasuk rasisme terhadap masyarakat adat. Amnesty Internasional juga sering menerbitkan publikasi mengenai kekhawatiran mereka terhadap penegakkan hak asasi manusia di Kanada.

Amnesty International dapat dikatakan cukup kritis terhadap pemerintahan Perdana Menteri Harper yang menjabat sebelum Justin Trudeau. Amnesty International berpendapat bahwa Kanada mengalami kemunduran dalam hal penegakan Hak asasi manusia dibawah Pemerintahan Perdana Menteri Harper (Amnesty International, 2016). Pihak Amnesty International juga menyerukan kepada publik agar mengambil tindakan pada situs resmi mereka. Dalam seruan itu, Amnesty International menyerukan agar publik mengirim e-mail yang sudah disediakan templatnya kepada pemerintah Kanada agar mengambil tindakan terhadap diskriminasi sistemik yang dihadapi oleh Masyarakat Adat.

Berbeda dengan Amnesty Internasional ataupun PBB, International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA) memberikan insight mengenai apa yang terjadi terhadap masyarakat adat dan apa yang sebuah negara lakukan terhadap masyarakat

adat melalui publikasi laporan yang mereka terbitkan setiap tahun. Laporan tahunan IWGIA tersebut bertajuk 'Indigenous World'. Tentunya dalam laporan tersebut keputusan – keputusan yang dibuat oleh pemerintah Kanada yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat adat di Kanada tidak luput dari laporan tahunan IWGIA. Nama Kanada tidak pernah tidak disebut dalam laporan tahunan IWGIA. Disebutkan pula pada laporan IWGIA yang terbit pada tahun 2008, bahwa terkait dengan ketidaksetujuan Kanada terhadap UNDRIP, sebenarnya Kanada sendiri tidak memiliki halangan secara legal atau hukum untuk menyetujui dan mengimplementasikan UNDRIP kedalam sistem hukumnya. Pernyataan adopsi UNDRIP secara resmi oleh pemerintahan Justin Trudeau pada tahun 2016 lalu juga tidak luput dari laporan IWGIA pada tahun 2017.

Pada tahun 2015 silam, PBB melalui Office of High Commissioner on Human Rights (OHCHR) mengeluarkan sebuah pernyataan yang bernada teguran terhadap Kanada mengenai tindakannya yang dinilai kurang cepat tanggap mengenai permasalahan Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) yang selama ini menjadi permasalahan bagi Kanada. Pihak OHCHR sebelumnya mengirimkan dua anggota Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Niklas Bruun dan Barbara Bailey untuk melakukan investigasi rahasia pada tahun 2013 silam terkait dengan kasus hilang dan dibunuhnya para gadis dan wanita masyarakat adat di Kanada (OHCHR 2015). Dalam laporan investigasi tersebut, ditemukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women). Investigasi berjalan menurut laporan organisasi non pemerintah bahwa wanita dan gadis masyarakat adat cenderung lebih rentan mengalami tindak kekerasan fisik maupun seksual dibandingkan wanita dan gadis Kanada pada umumnya (OHCHR 2015). Kanada dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi tersebut karena tidak dengan sigap melakukan investigasi dan menyediakan perlindungan. OHCHR kemudian merekomendasikan Kanada untuk segera melakukan investigasi tingkat nasional terkait dengan kasus hilang dan dibunuhnya gadis dan wanita masyarakat adat ini (MMIWG).

Berubahnya Sikap Negara – Negara Yang Semula Bersama Kanada Dalam Menolak UNDRIP

Pada saat dideklarasikan pada tahun 2007 silam, Kanada bersama empat negara lainnya sepakat untuk tidak mendukung atau menyetujui UNDRIP pada saat deklarasi tersebut dideklarasikan. Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada dan Australia beralasan bahwa UNDRIP tidak sejalan dengan konstitusi negara mereka. Namun, kemudian keempat negara tersebut mulai merubah sikap mereka terhadap UNDRIP. Australia adalah salah satu negara yang memutuskan untuk mendukung UNDRIP pada tahun 2009 dan menjadikan UNDRIP sebagai pedoman dalam pembentukan hukum mereka. Penolakan yang dilakukan oleh Australia terhadap UNDRIP adalah didasari oleh pendapat bahwa UNDRIP lebih menjunjung tinggi hukum kebiasaan (customary law) dibandingkan dengan hukum nasional (national law). Langkah selanjutnya diikuti oleh Selandia baru yang pada tahun 2010 memutuskan untuk mendukung UNDRIP dan menegakkan isi UNDRIP yang konsisten dengan konstitusi negara Selandia Baru. Dengan menyetujui UNDRIP, Selandia Baru berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan orang – orang Maori. Dalam pernyataannya, sehubungan dengan pidato yang disampaikan oleh Menteri Urusan Maori Selandia Baru

mengenai dukungan Selandia Baru terhadap UNDRIP, Menteri Keadilan Selandia Baru Simon Power memberikan pernyataan susulan. Disampaikannya lewat pidato pada sesi rapat parlemen, Power mengatakan bahwa Selandia Baru akan berusaha untuk merumuskan agar Pihak Maori sebagai masyarakat adat di Selandia Baru, dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan (New Zealand Parliament, 2010).

Negara selanjutnya yang memutuskan untuk mendukung UNDRIP adalah Amerika Serikat. Pada tahun 2011, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat menetapkan bahwa mereka mendukung UNDRIP. Wujud dukungan mereka bertepatan dengan Native Heritage Month yang ditetapkan dalam rangka untuk mengenang warisan kebudayaan masyarakat adat Amerika Serikat (US State Department, 2011). Keputusan Amerika Serikat untuk memberikan dukungannya terhadap UNDRIP mendapatkan sambutan hangat dari para ketua masyarakat adat yang ada di Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Barack Obama dalam UNDRIP memiliki komponen yang dibutuhkan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan ‘rehabilitasi’ terhadap hubungannya dengan Masyarakat adat (US. State Department, 2011).

Sebelum secara resmi mengumumkan dukungannya terhadap UNDRIP dipanggung internasional pada tahun 2016 lalu, Kanada sebelumnya menolak untuk menyetujui UNDRIP pada saat diresmikan pada tahun 2007 silam. Alasan dari Kanada untuk tidak memberikan dukungannya adalah karena menurut Menteri Urusan Masyarakat Adat yang menjabat pada saat itu, Chuck Strahl, menyatakan bahwa UNDRIP tidak memiliki definisi yang jelas dan terlalu luas dalam tiap pasalnya. Selain itu juga ia menyatakan bahwa isi dari UNDRIP tidak sesuai dan sejalan dengan konstitusi Kanada, *Canadians Charter of Rights and Freedom* (CBC Canada, 2007). Pada tahun 2010, Kanada mengumumkan melalui situs resmi pemerintahnya bahwa mereka menarik sikap mereka yang semula tidak mendukung UNDRIP dan berbalik menawarkan dukungannya. Namun, usaha dan komitmen dalam menegakkan hak – hak dan juga keadilan bagi masyarakat adat dapat dikatakan masih lemah.

Tekanan Dari Negara Lain Atas Sikap Kanada Terhadap UNDRIP

Kanada sudah seringkali mendapatkan teguran karena sikapnya dalam memperlakukan masyarakat adat di Negeranya. Pada saat masa pemerintahan Perdana Menteri John Diefenbacher, Kanada menentang keras tindakan Apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Namun, kemudian pemerintahan Diefenbacher menerima kritik dari pihak Afrika Selatan mengenai perlakuan Kanada terhadap Masyarakat Adatnya. Efek dari kritik tersebut terbilang cukup membuat pihak pemerintah Kanada terpukul karena setelahnya, masyarakat adat mulai diberikan hak pilih secara resmi pada tahun 1960 (Exner-Pirot, 2018). Terkait dengan UNDRIP, Kanada juga tidak luput dari kritik negara lain. Pada sesi Universal Periodic Review (UPR) yang diadakan oleh PBB padang tahun 2013 lalu, Kanada menerima baik pujian maupun teguran daripada negara – negara lain yang turut hadir. Tidak sedikit jumlah dari negara – negara lain yang hadir memuji Kanada dalam usahanya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Beberapa negara lainnya pun juga mengekspresikan kekecewaan dan kekhawatiran atas keadaan masyarakat adat di Kanada.

Bolivia, yang merupakan negara pertama yang menyelaraskan konstitusi negaranya dengan UNDRIP, merekomendasikan sejumlah solusi bagi Kanada. Bolivia mengekspresikan kekhawatirannya akan keadaan wanita dan anak – anak masyarakat adat di Kanada dengan salah satu rekomendasi yang berisi tentang bagaimana Kaanda

harus mengimplementasikan dalam undang – undang nya bahwa kekerasan terhadap wanita dan anak – anak sebagai tindakan kriminal. Bolivia juga merekomendasikan untuk Kanada meratifikasi Konvensi ILO 169 sebagai alternatif mengingat sikap Kanada terhadap UNDRIP.

Negara selanjutnya adalah Iran, yang menggaris bawahi kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus terjadi di Kanada. Termasuk didalamnya adalah perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat Adat di Kanada. Iran juga memperhatikan kasus diskriminasi yang dialami oleh warga Kanada keturunan Arab di Kanada. Khususnya yang terjadi pasca peristiwa 9/11 tahun 2001 lalu di Amerika Serikat. Iran sendiri merekomendasikan Kanada untuk menelusuri akar masalah dari peristiwa – peristiwa diskriminasi ini. Serta disarankan untuk mencari solusi yang selaras dengan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP). Iran sendiri sebelumnya mengalami kerenggangan hubungan dengan pemerintah Kanada terkait dengan permasalahan Nuklir. Pada tahun 2012 lalu, perwakilan dari Iran menemui salah satu tokoh masyarakat adat Kanada dan menyatakan dukungannya untuk masyarakat adat. Perwakilan dari Iran pun membawa tokoh tersebut, Terry Nelson, ke Iran dan melakukan siaran televisi dimana ia menceritakan tentang apa yang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di Kanada (Carlson, 2012). Tindakan ini menuai kontroversi, Terry sendiri ditakutkan hanya akan menjadi ‘pion’ perselisihan politik antara kedua negara ini.

Kritik juga disampaikan oleh Kuba. Dalam kritik yang disampaikan nya, Kuba menyayangkan tindakan Kanada yang menolak resolusi dari negara – negara yang lain. Kuba juga menyayangkan bahwa Kanada seperti mengasingkan diri dari usaha internasional untuk memerangi rasisme, diskriminasi rasial, dan juga xenophobia. Selain itu, Kuba juga menyayangkan bahwa dengan Kanada belum menjadi bagian dari konvensi – konvensi internasional mengenai diskriminasi, terutama terhadap masyarakat adat, sebagai salah satu komponen demokrasi. Meskipun Kuba memiliki rekam jejak yang tidak cukup bagus dalam hal penegakkan hak asasi manusia, Kuba menjadi rumah bagi masyarakat adat Taino dan Arawak. Alih – alih mempersekusi masyarakat adatnya, Kuba justru mempelajari cara hidup masyarakat adat Taino yakni bercocok tanam. Hal tersebut diakibatkan oleh krisis suplai makanan yang dialami oleh Kuba setelah jatuhnya pemerintahan Soviet (Baker, 2019). Warga Kuba sendiri ternyata setelah dilakukan penelitian, dalam darah mereka memiliki setidaknya sebesar 34,5% darah masyarakat Taino (Barreiro, 2017). Hal ini membuktikan mitos yang ada dikalangan masyarakat Kuba bahwa masyarakat adat Kuba telah musnah. Namun, Klan masyarakat adat Taino yang terbesar masih ada hingga sekarang, yakni keluarga Rojas-Ramirez (Baker, 2019).

Tren Global Mengenai Penegakkan Hak Asasi Manusia

Permasalahan mengenai hak asasi manusia sudah sejak lama menjadi pembahasan. Jauh sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, dokumen – dokumen pendahulunya seperti Magna Charta sudah ada terlebih dahulu. Perumusan piagam hak asasi manusia modern juga dapat dikatakan sebagai hasil dari kekhawatiran akan terjadinya kembali peristiwa Perang Dunia Kedua yang memakan korban sebanyak kurang lebih 85 Juta Jiwa. Tidak lupa juga perlakuan – perlakuan yang dilakukan oleh NAZI Jerman pada era itu terhadap orang – orang Yahudi. Perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dapat disebut sebagai

upaya untuk mencegah munculnya kembali peristiwa – peristiwa serupa pada masa mendatang (Bhabha, 2014).

Pada era modern ini, negara yang melakukan pelanggaran atau pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia akan menerima kecaman dari hampir seluruh negara – negara dunia serta organisasi – organisasi penegak Hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi, yang seringkali dilakukan oleh baik negara maupun individu adalah diskriminasi. Baik terhadap ras, suku maupun agama. Diskriminasi yang sering terjadi dilakukan baik secara terang – terangan maupun secara sembunyi – sembunyi. Akar dari beberapa kasus diskriminasi yang terjadi disebut negara biasanya dari diskriminasi sistemik yang berasal dari pemerintah.

Kanada terkenal sebagai salah satu negara penegak Hak asasi manusia dalam panggung internasional. Sudah sejak pasca Perang Dunia Kedua undang – undang yang berhubungan dengan penegakan hak asasi manusia disahkan di Kanada. Membuat bentuk apapun yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk diskriminasi memiliki konsekuensi secara hukum baik dalam tingkat provinsi maupun federal (Howe & Johnson, 2000). Namun, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Stephen Harper banyak yang memandang bahwa Kanada mengalami kemunduran dalam hal penegakan Hak asasi manusia. Baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Hal ini menjadi sorotan berbagai pihak. Baik oleh negara – negara lain maupun organisasi – organisasi internasional.

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah keengganan Perdana Menteri Harper untuk melakukan intervensi terhadap jurnalis berkewarganegaraan Kanada yang ditahan di Mesir pada tahun 2015 lalu. Jurnalis yang bernama Mohamed Fahmy adalah seorang jurnalis keturunan Mesir yang berkewarganegaraan Kanada. Harper, yang berasal dari partai konservatif mendapat kritikan dari partai oposisinya, Partai Liberal dan New Democratic Party (NDP) yang mengatakan bahwa ia tidak memahami urgensi dari kasus tersebut (CBC Canada 2015). Kasus tersebut menuai kritikan dan membuat petisi beredar yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh – tokoh ternama Kanada seperti Jaksa Agung Louise Arbour, Penulis John Ralston Saul serta Mantan Perdana Menteri Kanada Paul Martin.

Dalam lingkup domestik, Perdana Menteri Harper juga dinilai lambat dalam menangani kasus – kasus seperti Missing And Murdered Indigenous Women And Girls (MMIWG). Dari sekian banyak kasus yang berhubungan dengan masa lalu kelim hubungan pemerintah Kanada dengan masyarakat adatnya, Perdana Menteri Harper hanya baru meminta maaf mengenai residential school yang memakan banyak korban anak – anak dari masyarakat adat pada tahun 2008 lalu. Terkait dengan isu Missing And Murdered Indigenous Women And Girls (MMIWG), pada masa pemerintahannya, Stephen Harper mengatakan bahwa national inquiry atau penyelidikan tingkat nasional tidak terlintas dalam radar pemerintah Kanada (Kappo 2014). Tindakan baru diambil oleh pemerintah Kanada setelah Perdana Menteri Justin Trudeau terpilih untuk menggantikan Stephen Harper. Dalam lingkup domestik, ia memberi lampu hijau untuk diadakannya national inquiry atau investigasi tingkat nasional. Sedang pada lingkup internasional, Perdana Menteri Trudeau mendeklarasikan bahwa Kanada akan berkomitmen dengan United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) pada Sidang Umum PBB tahun 2016 lalu.

KESIMPULAN

Kanada memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kolonialisme di negaranya. Perlakuan pemerintah kolonial Kanada pada saat itu terhadap masyarakat adatnya juga tidak lepas dari perlakuan yang terbilang kurang adil. Kesenjangan juga terjadi baik dari segi ekonomi maupun perlakuan dari pihak pemerintah terhadap warga masyarakat adat Kanada ini. Meskipun pemerintah Kanada sudah memiliki instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang ada, situasi masih tetap tidak berubah bagi masyarakat adat.

Sikap Kanada terhadap UNDRIP pada awal dirumuskan tidak cukup mengindahkan. Maka dari itu, perubahan sikap Kanada terhadap UNDRIP merupakan fenomena yang cukup menimbulkan pertanyaan. Sudah pasti ada faktor – faktor yang menjadi pendorong Kanada dalam mengambil keputusan untuk merubah sikapnya terhadap UNDRIP. Dengan menggunakan decision making theory sebagai pisau analisis, ditemukan faktor – faktor yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi faktor pendorong perubahan sikap Kanada terhadap UNDRIP.

Pengaruh dari partai yang sedang berkuasa ternyata mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh agenda – agenda dan prinsip dari partai yang sedang berkuasa di Kanada. Identitas multikultural milik Kanada yang telah menjadi ‘brand’ milik Kanada yang telah dipasarkan oleh Kanada juga merupakan salah satu faktor pendorong yang dipertimbangkan. Dorongan yang datang dari organisasi dan gerakan protes seperti Idle No More yang hingga saat ini terhitung sebagai gerakan protes dari pihak masyarakat adat yang terbilang masif. Gerakan yang dimulai sejak akhir tahun 2012 tersebut tidak hanya eksis di lapangan saja, namun juga eksis di dunia maya. Bahkan terhitung sebagai gerakan protes yang terbilang berpengaruh di ranah media jejaring sosial, khususnya pada situs jejaring sosial twitter.

Tren global mengenai penegakan hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan bagi Kanada. Dalam hal ini, Kanada sendiri memiliki reputasi sebagai salah satu negara yang menentang kebijakan apartheid yang dulu pernah diterapkan oleh Afrika Selatan. Penegakan hak asasi manusia juga merupakan agenda dari Partai Liberal Kanada yang dominan di parlemen Kanada bersamaan dengan kepemimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau. Selain itu, tekanan dari pihak organisasi internasional seperti Amnesty International, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), dan juga International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA) juga menjadi pendorong lainnya. Laporan, peninjauan, petisi dan seruan aksi yang dilakukan oleh perwakilan dari organisasi – organisasi tersebut mengenai penegakan hak – hak masyarakat adat dipublikasikan oleh mereka. Seperti PBB yang mengirimkan Special Rapporteur nya untuk melakukan peninjauan terhadap keadaan masyarakat adat di Kanada juga menuliskan laporan dan mempublikasikannya di situs resmi milik PBB. Adanya perubahan sikap dari negara – negara lain yang semula memiliki sikap yang sama seperti Kanada juga menjadi faktor yang diperhitungkan oleh Kanada. Negara – negara tersebut yakni Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Ketiga negara tersebut berbalik mendukung dan mengadopsi UNDRIP dalam selang waktu yang terbilang dekat

REFERENSI

- Amnesty International (2016). *2016 Human Rights Agenda Canada*. Canada: Amnesty International.
- Bhabha, F. (2014). International Human Rights in Canada: At the Juncture of Law and Politics. *SSRN Electronic Journal*, [online] 10(5). Available at: <https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1054&context=olsrps> [Diakses 17 Sep. 2020]
- Baker, C.P. (2019). *Cuba's Taino people: A flourishing culture, believed extinct*. [online] BBC.com. Available at: <http://www.bbc.com/travel/story/20190205-cubas-tano-people-a-flourishing-culture-believed-extinct> [Diakses 2 Mar. 2021].
- Barreiro, J. (2017). Indigenous Cuba: Hidden in Plain Sight. *American Indian Magazine*. [online] Available at: <https://www.americanindianmagazine.org/story/indigenous-cuba-hidden-plain-sight> [Diakses 3 Mar. 2021].
- Callison, C. and Hermida, A. (2015). Dissent and Resonance: #IdleNoMore as an Emergent Middle Ground. *CANADIAN JOURNAL OF COMMUNICATION*, 40(), pp.695–716.
- Carlson, K.B. (2012). *Concern that First Nations will be “used as pawns” as former chief to meet Iranian leaders*. [online] National Post Canada. Available at: <https://nationalpost.com/news/canada/concern-that-first-nations-will-be-used-as-pawns-as-former-chief-to-meet-iranian-leaders> [Diakses 4 Mar. 2021].
- Exner-Pirot, H. (2018). *Friend or faux? Trudeau, Indigenous Issues and Canada's Brand*. [online] Canadian Foreign Policy Journal. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/11926422.2018.1461667> [Diakses 14 Nov. 2019].
- Guo, S. and Wong, L. (2015). *Revisiting Multiculturalism in Canada*. Rotterdam: Sense publishers.
- Hansen, J. (2017). *Missing and murdered Indigenous women and girls: Understanding the numbers*. [online] Amnesty International Canada. Available at: <https://www.amnesty.ca/blog/missing-and-murdered-indigenous-women-and-girls-understanding-the-numbers> [Diakses 1 Mar. 2021].
- Howe, R.B. and Johnson, D. (2000). *Restraining equality : human rights commissions in Canada*. Toronto: University Of Toronto Press.
- Kappo, T. (2014). *Stephen Harper's comments on missing, murdered aboriginal women show “lack of respect.”* [online] CBC News Canada. Available at: <https://www.cbc.ca/news/indigenous/stephen-harper-s-comments-on-missing-murdered-aboriginal-women-show-lack-of-respect-1.2879154> [Diakses 20 Sep. 2020].
- New Zealand Parliament (2010). *Ministerial Statements — UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples—Government Support - New Zealand Parliament*. [online] Parliament.nz. Available at: https://www.parliament.nz/en/pb/hansard-debates/rhr/document/49HansD_20100420_00000071/ministerial-statements-un-declaration-on-the-rights-of [Diakses 20 Sep. 2020].
- Srikanth, H. (2012). Multiculturalism and the Aboriginal Peoples in Canada. *Economic and Political Weekly*, 47, pp.17–21.
- Snyder, R.C., Bruck, H.W. and Sapin, B.M. (1962). *Foreign Policy Decision Making: an Approach to the Study of Intenational Politics*. New York: Glencoe.

- Xing, Y. (2015). Analysis of Political Decision-Making and Its Influencing Factors. *Cross-Cultural Communication Canada*, 11(3), pp.42–46.
- U.S. State Department (2011). *Announcement of U.S. Support for the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. [online] U.S. Department of State. Available at: <https://2009-2017.state.gov/s/srgia/154553.htm> [Diakses 31 Oct. 2019].